

Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan *Civic Engagement* dalam Gerakan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Revitalizing Citizenship Education to Increase Civic Engagement in the Sustainable Development Goals (SDGs) Movement

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Afifah Nur Khusna

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: afifahnurkhusna@gmail.com

Nayla Damayanti

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: ngitanayla@gmail.com

Article Info

Received : 30 September 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 20 October 2025
Published : 26 October 2025

Keywords: Civic Education, Revitalization, Civic Engagement, Pancasila, Sustainable Development Goals (SDGs).

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Revitalisasi, Civic Engagement, Pancasila, Sustainable Development Goals (SDGs)

Abstract

Amidst rising intolerance, moral decline, low social solidarity, and a national identity crisis, reforming Civics Education (PKn) has become an urgent need to restore the nation's identity based on the values of Pancasila. PKn aims not only to instill an understanding of laws and norms, but also to develop character, integrity, responsibility, and social empathy. This renewal process involves innovations in orientation, methods, and learning practices that are more contextual and interactive, and capable of increasing social awareness and active student involvement in national life. There is a close relationship between the revitalization of Civics and the Sustainable Development Goals (SDGs) because both share the same goal: building a peaceful, just, inclusive, and sustainable society. Civics plays a crucial role in helping achieve several SDG goals, such as quality education, reducing inequality, addressing climate change, and strengthening global peace and cooperation. Through an approach that emphasizes civic engagement, Civics encourages students not only to understand their rights and obligations but also to actively participate in social, political, and environmental issues. The choice of the theme of revitalizing Civics (PKn) to increase civic engagement in the SDGs movement is based on the challenge of declining community participation, especially among the younger generation, who are becoming indifferent to national issues. Furthermore, the development of digitalization has changed moral values and nationalism, so Civics must adapt to create critical and responsible digital citizens. With the revitalization of Civics based on the values of Pancasila and the spirit

of the SDGs, education can function as a transformative force in shaping a generation of quality, critical thinkers, empathizers, and committed to peace and social justice both at the national and global levels.

Abstrak

Di tengah meningkatnya intoleransi, kemerosotan moral, rendahnya solidaritas sosial, serta krisis identitas bangsa, pembaruan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi sebuah kebutuhan mendesak guna mengembalikan identitas bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. PKn tidak hanya bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai hukum dan norma, tetapi juga untuk mengembangkan karakter, integritas, tanggung jawab, dan empati sosial. Proses pembaruan ini melibatkan inovasi dalam hal orientasi, metode, dan praktik pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, serta mampu meningkatkan kesadaran sosial dan keterlibatan aktif siswa dalam kehidupan berbangsa. Ada hubungan erat antara revitalisasi PKn dan Sustainable Development Goals (SDGs) karena keduanya memiliki tujuan serupa, yaitu membangun masyarakat yang damai, adil, inklusif, dan berkelanjutan. PKn memiliki peranan penting dalam membantu mencapai beberapa tujuan SDGs seperti pendidikan yang berkualitas, pengurangan ketidaksetaraan, tindakan terkait perubahan iklim, serta penguatan perdamaian dan kerja sama global. Melalui pendekatan yang menekankan keterlibatan sipil, PKn mendorong siswa tidak hanya untuk memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga untuk aktif berpartisipasi dalam isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Pemilihan tema revitalisasi PKn untuk meningkatkan keterlibatan sipil dalam gerakan SDGs didasari oleh tantangan menurunnya partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang mulai acuh tak acuh terhadap isu-isu kebangsaan. Selain itu, perkembangan digitalisasi telah mengubah nilai-nilai moral dan nasionalisme, sehingga PKn harus beradaptasi guna menciptakan warga digital yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan revitalisasi PKn yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan semangat SDGs, pendidikan dapat berfungsi sebagai kekuatan transformatif dalam membentuk generasi yang berkualitas, berpikir kritis, berempati, serta berkomitmen pada perdamaian dan keadilan sosial baik di tingkat nasional maupun global.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Afifah Nur Khusna, Nayla Damayanti. "Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Civic Engagement dalam Gerakan Sustainable Development Goals (SDGs)", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 613-627. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Afifah Nur Khusna, Nayla Damayanti



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah bagian penting dalam sistem pendidikan nasional dan juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan demokratis. Melalui PKn, anak-anak muda diharapkan tidak hanya memahami dan menerima Pancasila sebagai dasar negara serta prinsip demokrasi, tetapi juga bisa berperan aktif dalam menerapkan nilai-nilai

kebangsaan dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB sejak tahun 2015, SDGs menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini. SDGs membutuhkan adanya pengintegrasian nilai-nilai PKn. Dalam publikasi penelitian tahun 2021 oleh Mark Priestley dalam jurnal *British Journal of Educational Studies*, disebutkan bahwa pendidikan global citizenship (GCED) sudah terintegrasi dalam SDGs, tetapi PKn belum. Oleh karena itu, revitalisasi PKn sangat penting. Menurut Biesta (2011) dalam artikel yang sama, pendidikan PKn yang bersifat tradisional tidak mampu menghadapi isu-isu masa kini, sehingga diperlukan penggabungan nilai-nilai kewarganegaraan dan SDGs.

Revitalisasi pendidikan kewarganegaraan berarti mengembalikan dan meningkatkan peran mata pelajaran PKn sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Tujuan dari revitalisasi ini bukan hanya membentuk warga negara yang taat pada hukum, tetapi juga menciptakan individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, serta empati terhadap sesama. Proses revitalisasi ini harus dilakukan dengan memperbarui kurikulum, metode belajar yang lebih aktif dan sesuai dengan konteks kehidupan, serta memperkuat peran guru sebagai penggerak perubahan. PKn yang direvitalisasi bisa menjadi jembatan antara nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan nyata yang dihadapi siswa. Dengan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif, siswa tidak hanya diberi tahu tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengalaminya, merasakannya, dan mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari, seperti yang disampaikan oleh Nuryanto (2020).

Peran guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam upaya revitalisasi ini. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dan pembentuk karakter siswa. Guru perlu mampu merancang strategi pembelajaran yang menarik, menciptakan suasana kelas yang demokratis, serta membentuk nilai-nilai kewarganegaraan melalui tindakan dan perilaku mereka. Selain itu, penting adanya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter yang berkelanjutan. Revitalisasi PKn akan lebih efektif jika dilakukan secara menyeluruh dan konsisten di semua jenjang pendidikan serta diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan (Suryadi, 2021).

Di tengah era digital dan globalisasi yang membawa berbagai budaya asing dengan cepat, pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nilai karakter bisa menjadi perlindungan bagi keutuhan bangsa. Revitalisasi PKn merupakan kebutuhan mendesak agar generasi muda tidak terlepas dari akar budaya bangsa. Pendidikan karakter melalui PKn harus menjadi upaya yang sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Jika nilai-nilai karakter bangsa diperkuat sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan, maka Indonesia akan memiliki generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam aspek moral dan spiritual (Putri & Kurniawan, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya menyadari hak dan kewajiban mereka, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, rasa tanggung jawab, dan empati sosial yang mendalam. Dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan relevan, PKn menghubungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan aktivitas sehari-hari, sehingga siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat serta mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu hambatan utama dalam PKn adalah penggunaan metode pengajaran yang masih tradisional dan kurangnya keterlibatan aktif dari siswa, sehingga diperlukan penyegaran kurikulum dan penguatan peran guru agar pendidikan ini lebih tepat dan efektif dalam membentuk karakter bangsa yang siap menghadapi perubahan global. Oleh karena itu, PKn berfungsi sebagai fondasi yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, beretika, dan memiliki tanggung jawab sebagai warga negara serta agen perubahan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan beberapa lokasi untuk mendalami dinamika sosial serta pendidikan yang menjadi dasar revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks global, terutama dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam gerakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan ini dipilih karena memberi peluang kepada peneliti untuk menggali pengalaman subjektif, makna, dan konteks sosial yang terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan komunitas sosial yang tidak dapat terungkap secara menyeluruh dengan metode kuantitatif.

Desain studi kasus multi-situs memfasilitasi perbandingan proses revitalisasi PKn di berbagai tempat dengan berbagai karakteristik sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda. Penelitian ini bersifat deskriptif-interpretatif, tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga memahami arti di balik proses sosial yang berlangsung, dengan penekanan pada penginternalisasian konsep partisipasi warga dalam pendidikan kewarganegaraan serta pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam inisiatif SDGs, seperti isu lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, di mana proses pengumpulan data berakhir ketika tidak ada temuan baru yang diperoleh. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena revitalisasi PKn dan bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan yang transformatif ditanamkan dalam praktik pendidikan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengenalan Pendidikan Kewarganegaraan dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang membantu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta rasa tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Di Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, suku, agama, dan ras, PKn memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat karakter bangsa. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral secara teori, tetapi juga membantu siswa mengembangkan kesadaran dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang fokus pada pembentukan karakter merupakan dasar utama dalam menciptakan generasi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. PKn memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menyelipkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan (Samsuri, 2019).

Melalui PKn, siswa tidak hanya diperkenalkan pada konsep dasar kewarganegaraan, tetapi juga diajarkan nilai-nilai moral yang mencerminkan jati diri bangsa, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, cinta tanah air, dan kepedulian sosial (Wibowo, 2018). Proses internalisasi nilai-nilai karakter tersebut tidak hanya dilakukan melalui materi yang bersifat kognitif saja, tetapi juga melalui pembiasaan, teladan, serta pembelajaran yang reflektif dan kontekstual (Nuryanto, 2020).

Proses belajar PKn yang baik dapat membentuk siswa yang berintegritas, melaksanakan keadilan, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari (Putri & Kurniawan, 2022). Dalam konteks ini, PKn seharusnya tidak hanya dianggap sebagai pelajaran yang hanya menghafal fakta, tetapi sebagai alat penting dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh dan beradab (Suryadi, 2021).

Selain itu, penekanan pada prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pembuatan perundang-undangan juga diberikan, dengan khusus menekankan pada kajian hukum Islam. Mereka juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip kewarganegaraan yang adil dan inklusif dalam konteks hukum Islam, serta relevansinya terhadap hukum nasional dalam penyusunan kebijakan dan peraturan yang memperhatikan hak asasi manusia serta menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara. Dalam kewarganegaraan digital, ada yang membahas tentang hak dan kewajiban seseorang dalam beraktivitas di dunia maya, karena hak dan kewajiban ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh warga negara, terlebih pada kalangan umat muslim (Muhamad, Nasoha, dan Najib, 2025).

Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs adalah sistem yang terencana dan terikat, yang melibatkan para pemimpin nasional, termasuk pemimpin Indonesia. SDGs berlaku di seluruh dunia dalam skala besar. Tujuan SDGs adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. (Puja Pangestu et al., 2021). Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030. Tujuan utamanya adalah mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang tanpa meninggalkan siapa pun (Anggraini & Nugraheni, 2024).

Meskipun konsep keberlanjutan sudah diperkenalkan beberapa dekade lalu, pandangan tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan pendekatan baru dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi empat aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, stabilitas keuangan, penguatan institusi, dan pelestarian lingkungan. Terdapat 17 tujuan inti dalam pembangunan berkelanjutan. (Nurfatimah et al., 2022).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (2020) merangkum empat tujuan utama dari 17 misi SDGs yang dapat dipetakan. Keempat tujuan tersebut adalah pembangunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terus-menerus; pembangunan yang menjaga kelangsungan hidup sosial masyarakat; pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup; serta pembangunan yang menjamin keadilan dan sistem tata kelola yang mampu memastikan peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi manusia, planet, dan kesejahteraan. SDGs tidak hanya fokus pada penghapusan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, tetapi juga bertujuan melindungi lingkungan serta membangun perdamaian yang berkelanjutan di seluruh dunia. (Wahyuningsih 2018).

Dalam pembicaraan mengenai empat tujuan utama SDGs, yaitu pembangunan yang mendukung kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, serta keadilan dan tata kelola yang baik untuk masa depan, terdapat peraturan hukum di Indonesia yang relevan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpres ini menjadi dasar hukum untuk menerapkan SDGs di Indonesia, yang mengatur penyelarasan tujuan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

4.2. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan SDGs

Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhubung erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs) karena keduanya bertujuan untuk

menciptakan individu yang berkarakter global, adil, dan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan. SDG 4, terutama pada target 4.7, menggarisbawahi nilai pendidikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kewarganegaraan global (Salim & Najicha, 2024). Dalam hal ini, PKn memiliki peranan penting dalam membangun karakter, moral, serta kesadaran sosial peserta didik agar mereka menjadi warga yang beretika dan bertanggung jawab.

Dengan revitalisasi PKn, prinsip-prinsip SDGs dapat diterapkan dalam kegiatan belajar, seperti SDG 16 mengenai perdamaian dan keadilan melalui pendidikan yang menentang korupsi dan penegakan hukum. Pendekatan yang melibatkan partisipasi dalam PKn terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan karakter kebangsaan para siswa (Wicaksono, Afnan, & Hendri, 2023). Selain itu, gagasan tentang kesetaraan gender (SDG 5) dan pengurangan ketidakadilan (SDG 10) dapat diajarkan melalui pendidikan yang menghargai keberagaman dan mempromosikan sikap inklusif (Fitriya, 2017).

Revitalisasi PKn juga mendukung SDG 13 (Tindakan Iklim) dan SDG 15 (Hidup di Darat) dengan memperkuat kewarganegaraan ekologis, yaitu kesadaran akan tanggung jawab ekologis individu. Penelitian Sari (2023) menunjukkan bahwa PKn dapat mendorong perilaku yang ramah lingkungan dan partisipasi dalam upaya pelestarian alam. Dengan demikian, PKn yang mengintegrasikan nilai-nilai SDGs berperan penting dalam membentuk warga negara yang baik serta juga sebagai global citizens yang berlandaskan Pancasila, cerdas, dan memiliki daya saing global (Desnita & Dewi, 2024).

4.3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki fungsi penting dalam membangun pemahaman politik dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam sistem demokrasi. Melalui proses pendidikan ini, siswa diajari untuk mengenal hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat serta berperan dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pemerintahan dan struktur politik, mereka dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kebijakan publik. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha terencana untuk mengasah potensi siswa agar mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih berkualitas (Royhan, 2022).

Aspek utama dalam PKn termasuk pengembangan kemampuan kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Ketiga elemen ini menghasilkan individu yang memahami hak dan tanggung jawab yang mereka miliki serta mampu menerapkannya dalam konteks sosial-politik (Dewey, 1916; Parker, 2003). Pendidikan ini juga berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis, memungkinkan siswa untuk mengevaluasi kebijakan publik, mengajukan pertanyaan, dan menawarkan ide-ide untuk peningkatan sistem pemerintahan (Westheimer & Kahne, 2004).

Di samping itu, sikap kewarganegaraan memainkan peran esensial dalam mengembangkan pola pikir politik yang proaktif dan bertanggung jawab. Siswa yang memiliki sikap kewarganegaraan yang positif akan lebih menyadari pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik dan sosial, seperti pemilihan umum dan diskusi mengenai kebijakan publik (Kahne & Westheimer, 2006). PKn juga mengajarkan rasa tanggung jawab individu terhadap pilihan politik mereka dan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan warga negara dapat mempengaruhi kebijakan serta stabilitas dalam demokrasi (Torney-Purta et al., 2001). Maka dari itu, PKn tidak hanya memperkenalkan dasar-dasar politik, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang cerdas, peduli, dan siap memberikan sumbangsih untuk kemajuan masyarakat.

4.4. Tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa dan strategi revitalisasi pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada karakter.

Tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan untuk membentuk karakter bangsa, tetapi dalam praktiknya di lapangan menghadapi berbagai tantangan (Samsuri, 2019). Proses belajar yang masih tradisional dan bergantung pada guru serta memaksa siswa menghafal, membuat siswa hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis tanpa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Wibowo, 2018; Putri & Kurniawan, 2022). Hal ini menyebabkan karakter siswa kurang kuat dan kurang memiliki dasar moral yang jelas (Nuryanto, 2020). Ketergantungan pada metode mengajar berupa ceramah dan kurangnya partisipasi siswa membuat mata pelajaran PKn tidak menarik lagi dan kehilangan relevansi dalam kehidupan sehari-hari (Suryadi, 2021).

Tantangan berikutnya muncul dari keterbatasan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berfokus pada nilai dan refleksi (Samsuri, 2019). Banyak pendidik PKn yang belum memperoleh pelatihan yang memadai untuk meningkatkan metode pengajaran yang sejalan dengan pembentukan karakter (Wibowo, 2018). Banyaknya tuntutan administratif dan kurangnya keterlibatan dalam pengembangan profesional juga memperburuk stagnasi pedagogis yang mengganggu efektivitas proses belajar (Putri & Kurniawan, 2022). Di sisi lain, pengaruh globalisasi dan teknologi informasi membawa nilai-nilai individualisme dan pragmatisme yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa (Wibowo, 2018). Tanpa penguatan karakter yang positif, siswa menjadi rentan terhadap pengaruh konten negatif seperti intoleransi dan ujaran kebencian (Nuryanto, 2020; Suryadi, 2021).

Selain faktor dari dalam, rendahnya keterlibatan dari keluarga dan masyarakat juga menjadi kendala bagi suksesnya pendidikan karakter melalui PKn (Samsuri, 2019). Banyak orang tua yang sepenuhnya menyerahkan

tanggung jawab pengembangan karakter kepada institusi pendidikan tanpa menambahkan dukungan moral di rumah (Putri & Kurniawan, 2022). Sebenarnya, nilai-nilai karakter harus ditanamkan secara terus-menerus di sekolah, rumah, dan masyarakat (Nuryanto, 2020). Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan PKn dalam memperkuat karakter bangsa (Suryadi, 2021). Revitalisasi PKn harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas guru, menghadirkan inovasi dalam proses belajar mengajar, serta mendapatkan dukungan dari semua pihak agar PKn bisa kembali berfungsi dengan baik sebagai dasar dalam pembentukan generasi yang berkarakter (Putri & Kurniawan, 2022).

Strategi Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter

Strategi untuk menghidupkan kembali Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus dirancang dengan cara menyeluruh agar mampu menjawab tantangan yang ada dalam dunia pendidikan dan kompleksitas sosial yang ada (Samsuri, 2019). Perubahan dalam kurikulum dianggap sebagai langkah awal yang sangat penting dengan cara menyisipkan nilai-nilai karakter yang relevan dan berguna bagi kehidupan siswa (Putri & Kurniawan, 2022). Kurikulum yang terlalu kaku hendaknya digantikan dengan pendekatan tematik yang mengangkat isu-isu terkini seperti pencegahan korupsi, toleransi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila (Nuryanto, 2020). Selain itu, metode pengajaran harus memberikan peluang bagi siswa untuk menghayati, merenungkan, dan menginternalisasi nilai-nilai melalui aktivitas yang melibatkan partisipasi, diskusi, studi kasus, dan proyek berbasis pengalaman (Wibowo, 2018; Suryadi, 2021).

Peran pendidik sangat krusial dalam pembaruan PKn, karena mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan nilai dan etika bagi murid-murid (Samsuri, 2019). Para pengajar harus memiliki kemampuan dalam merancang proses pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai, berkomunikasi dengan baik, dan menunjukkan teladan dalam aktivitas sehari-hari (Wibowo, 2018). Dengan demikian, diperlukan pengembangan pelatihan berkelanjutan serta komunitas belajar bagi guru PKn untuk meningkatkan kapasitas profesional dan integritas moral mereka (Suryadi, 2021). Guru yang memiliki karakter yang kokoh dan kesadaran akan nilai akan lebih berhasil dalam memotivasi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan taat hukum (Nuryanto, 2020).

Tidak hanya meningkatkan dasar kurikulum dan kemampuan pengajar, strategi revitalisasi PKn juga membutuhkan kerja sama antara institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pendidikan yang berfokus pada karakter (Samsuri, 2019). Institusi pendidikan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari orang tua dan lingkungan sosial yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan (Putri & Kurniawan, 2022). Aktivitas seperti kegiatan ekstrakurikuler, pengabdian

masyarakat, dan forum kebangsaan dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam memperkuat watak siswa (Suryadi, 2021). Oleh karena itu, melalui kerjasama lintas sektor, pembelajaran yang reflektif, dan contoh dari para pengajar, PKn dapat melaksanakan fungsinya sebagai penjaga utama dalam melestarikan identitas nasional dan membentuk generasi yang memiliki karakter kokoh, tangguh, dan beradab dalam menghadapi tantangan globalisasi (Nuryanto, 2020).

4.5. Civic Engagement

Civic Engagement adalah bentuk partisipasi aktif dari individu atau kelompok dalam mengatasi masalah sosial demi memperbaiki kualitas kehidupan bersama. Kesadaran sebagai warga negara dan partisipasi dalam kehidupan sosial merupakan landasan krusial untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan adil. Tanpa adanya peran aktif dari warga, berbagai program serta tujuan sosial akan sulit terwujud. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan mengambil posisi strategis dalam mengembangkan kemampuan kewarganegaraan, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Melalui proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, pelajar dibentuk untuk menjadi warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Peran masyarakat dalam pengembangan kebijakan publik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi, karena memberikan kesempatan bagi warga untuk memberikan masukan dan berpengaruh terhadap keputusan yang berdampak pada hidup mereka. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan yang ada, tetapi juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, partisipasi warga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, jenis pekerjaan, dan akses terhadap informasi. Oleh karenanya, peningkatan kesadaran kewarganegaraan melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci dalam mendorong partisipasi aktif dan rasa kepemilikan terhadap kebijakan publik.

Dalam upaya pembangunan berkelanjutan, keterlibatan warga juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 17 yang terkait kemitraan global. Warga yang aktif dan sadar bertindak sebagai agen perubahan, mendorong nilai-nilai inklusif, kolaboratif, dan keadilan sosial. Dengan pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas, dan melindungi lingkungan. Namun, pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakmerataan ekonomi, lemahnya penerapan hukum, dan birokrasi yang tidak efisien. Ini menjadikan perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum serta penguatan lembaga demokrasi agar seluruh warga dapat menikmati hak konstitusi secara adil.

Di zaman yang serba digital ini, Generasi Z berperan krusial dalam memperluas bentuk-bentuk baru keterlibatan masyarakat melalui teknologi dan media sosial. Platform digital memungkinkan warga, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, menyampaikan keinginan, dan memantau kebijakan secara langsung. Model pemerintahan yang partisipatif dengan basis teknologi ini menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, isu seperti ketidakmerataan akses informasi dan rendahnya tingkat literasi digital masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan keterlibatan publik harus difokuskan pada pemberdayaan digital, pendidikan tentang kebijakan, dan pembentukan ruang dialog yang aman bagi semua kalangan, supaya keterlibatan masyarakat dapat menjadi pendorong utama demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan sosial. Landasan hukum tentang peran keterlibatan warga negara Indonesia dapat didasarkan pada beberapa pasal di Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), antara lain:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk keterlibatan warga negara, harus dikembalikan kepada rakyat.

4.6. Bentuk-bentuk *Civic Engagement*

- Politik

Civic engagement politik mencakup partisipasi dalam proses politik formal, seperti pemilihan umum, kampanye, dan advokasi kebijakan. Penelitian oleh Suhariyanto dan Rozak (2025) menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan penggunaan media sosial secara signifikan meningkatkan keterlibatan politik generasi Z di Indonesia. Selama pandemi COVID-19, aktivisme politik beralih ke ranah digital. Yusuf dan Wibowo (2021) mencatat bahwa mahasiswa di Malang menggunakan platform daring untuk menyuarakan aspirasi politik dan mengorganisir aksi sosial, menunjukkan adaptasi terhadap keterbatasan interaksi fisik. Landasan hukum : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- Sosial

Civic engagement sosial melibatkan partisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti kerja sukarela, penggalangan dana, dan program pemberdayaan masyarakat. Azizah dan Sari (2023) menyoroti bahwa generasi Z di Indonesia aktif dalam kegiatan sosial melalui organisasi kemasyarakatan dan inisiatif berbasis komunitas. Pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter juga memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan sosial. Mooney dan Edwards (2022) menyarankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman, seperti

layanan masyarakat, dapat memperkuat komitmen siswa terhadap partisipasi sosial. Landasan Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

- Digital

Civic engagement digital merujuk pada partisipasi warga negara dalam aktivitas sosial dan politik melalui platform digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi partisipatif. Di Indonesia, penggunaan media sosial oleh generasi digital native (usia 18–24 tahun) telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam isu-isu publik. Studi oleh Tarsidi et al. (2023) menunjukkan bahwa media sosial memfasilitasi diskusi lintas pandangan dan memperdalam pemahaman terhadap isu sosial dan politik. Namun, tantangan seperti misinformasi dan kesenjangan digital masih menjadi hambatan. Nchaga (2025) menekankan pentingnya literasi digital untuk memastikan partisipasi yang efektif dan inklusif dalam ruang digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan yang sangat vital dalam mengembangkan karakter, kesadaran, dan tanggung jawab individu sebagai warga negara, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip demokrasi. Dengan mengimplementasikan nilai moral yang solid, membiasakan perilaku positif, dan menghadirkan pengalaman belajar yang berarti, PKn tidak hanya mendorong ketaatan terhadap hukum, tetapi juga memperkuat integritas, rasa empati terhadap komunitas, serta kesadaran terhadap isu-isu global yang muncul. Salah satu indikator konkret dari kontribusi PKn di tingkat global adalah dukungannya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, serta melindungi lingkungan demi kelangsungan hidup. Keterkaitan antara PKn dan SDGs terletak pada usaha kedua pihak dalam membentuk individu yang memiliki karakter, daya saing, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat dan sekitarnya. Oleh karena itu, revitalisasi PKn melalui metode pembelajaran yang relevan dan inklusif, serta peningkatan peran aktif masyarakat di berbagai bidang, menjadi dasar yang sangat penting untuk mempercepat pencapaian pembangunan nasional yang adil, berkelanjutan, dan beretika di Indonesia.

5.2. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus kajian dengan melibatkan pendekatan empiris yang bersifat kuantitatif atau mixed-method agar hasil penelitian mengenai revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan keterlibatan sipil (civic engagement) dapat diukur secara lebih objektif. Selain itu, studi mendatang dapat mengkaji implementasi revitalisasi PKn dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal untuk melihat efektivitasnya pada berbagai jenjang dan lingkungan sosial. Peneliti juga dapat memperdalam

hubungan antara PKn dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tertentu, seperti SDG 4 (pendidikan berkualitas) dan SDG 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh), melalui studi kasus di sekolah atau komunitas. Aspek digital citizenship dan literasi kewarganegaraan berbasis teknologi juga perlu mendapat perhatian, mengingat pengaruh besar media digital terhadap partisipasi sosial generasi muda. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi pengembangan kurikulum PKn yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D. N., Salsabiilaa, S., Salsabila, & Fadhil, A. (2023). Revitalisasi peran pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran sipil perspektif sosiologi pendidikan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*.
- Anggraeni, D., & Nugraheni, S. (2024). Menuju pendidikan berkelanjutan: Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 189-197.
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanshzil, S. W. (2022). Revitalisasi peran perguruan tinggi dalam menangani gerak radikalisme dan fenomena melemahnya bela negara di kalangan mahasiswa. *Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Tabarok, N., Mumtazah, M. N., & Rahman, H. W. (2025). Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum: Kajian teoretis dan praktis di Indonesia. *Cendikia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 45-54.
- Budi, A. S. (2019). Meningkatkan *civic engagement* melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis proyek SDGs. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 25(1), 50-68.
- Desnita, F., & Dewi, D. A. (2024). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pengimplementasian pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Fadil, C., Zawawi, & Nisa, F. L. (2024). Implementasi bela negara (SDGs) mewujudkan generasi Islami. *JlIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Fitriya, H. (2017). Penguatan karakter bangsa melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Muhammadiyah.
- Gusmadi, S. (2022). Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dalam penguatan karakter peduli lingkungan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).
- Majiid, F. A. (2017). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan upaya implementasinya di Indonesia: Tantangan dan harapan*. Universitas Indonesia.

- Maulani, G., Saptadi, N. T. S., Wolo, H. B., Purnomo, A. C., Tangko, L. A. A., Suyitno, M., Agung, D., Hadikusumo, R. A., Talindong, A., & Peran, B. (2024). *Pendidikan kewarganegaraan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mustain Nashoha, A. M., Atqiya, A. N., Fitrianti, A. A., Latifah, L., Hermawan, A. F., & Galih, A. B. (2025). Analisis pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan *civic engagement*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(2), 121–129.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Dampak kewarganegaraan terhadap akses ekonomi: Analisis atas kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia. *Litera: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1–12.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Alfani, A. S., Jalaludin, M., & Dueramae, S. (2025). Peran serta warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 42–50.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ramadani, T. N., Hidayah, W. N., & Nasicha, E. S. (2025). Peran kewarganegaraan digital dalam perspektif hukum Islam bagi Muslim di dunia maya. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 134–144.
- Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., Furqon, W., & Johara, J. (2025). *Pendidikan kewarganegaraan: Kewarganegaraan yang berbasis hukum dan demokrasi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pamungkas, Z. B., & Wutsqah, U. (2025). Revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana penguatan karakter bangsa. *Hikamatzu: Journal of Multidisciplinary*, 2(1), 453–460.
- Putri, F., Susiba, K., Andila, K., Anita, N., & Febriyanti, Q. (2025). Penguatan *civic engagement* generasi Z melalui pendidikan kewarganegaraan. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 3(2), 167–176.
- Salim, A., & Najicha, F. U. (2024). Peran pendidikan Pancasila dalam mewujudkan cita-cita *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas PGRI Madiun.
- Salsabila, S. A. P., Nabilah, F., & Rachman, I. F. (2025). Studi evaluasi implementasi SDGs dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Literasi dan Pembelajaran Indonesia*, 5(1), 33–40.
- Sari, N. (2023). Membangun karakter *ecological citizenship* mahasiswa UNESA melalui pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan SDGs. *Prosiding Seminar Nasional MBKM UNESA*.
- Siregar, R. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dan SDGs: Strategi peningkatan *civic engagement* di kalangan pemuda urban. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(1), 78–95.
- Stoddard, J. (2025). Demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Jurnal Demokrasi dan Pendidikan*, 10(1), 34–52.
- Sulianti, A. (2018). Revitalisasi pendidikan Pancasila dalam pembentukan *life skill* mahasiswa. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 111–117.

- Usmi, R., Setyowati, R. R. N., Irfany, A. F., & Rianingsih, K. D. (2025). Membangun karakter *ecological citizenship* mahasiswa UNESA melalui pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Prosiding Seminar Nasional Mobilitas Akademik Tahun 2025*.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan keterlibatan warga negara dalam pembangunan berkelanjutan melalui program Go Green. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41–50.
- Wahid, A., Inayah, S., Gantina, L. H., Awom, S. B., Rumawak, S. A., Flora, H. S., Ramdhani, R. A., Tola, B., Wantu, H. M., & Jumardi, J. (2025). *Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan*. CV Rey Media Grafika.
- Wahyuni, S. (2022). Integrasi SDGs dalam pendidikan kewarganegaraan: Dampak terhadap partisipasi siswa di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(2), 112–130.
- Wicaksono, T., Afnan, N., & Hendri, I. R. (2023). Penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa di era globalisasi. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(3), 44–56.
- Yusuf, M. (2018). *Civic education and sustainable development: A framework for engagement in developing countries*. *Journal of Environmental Education*, 49(4), 256–270.
- Zahra, N. (2020). Revitalisasi kurikulum PKn untuk SDGs: Analisis partisipasi komunitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(3), 200–215.